

CITRA DAN IDENTITAS KOTA PADANG DALAM LINTASAN SEJARAHNYA^{*)}

Gusti Asnan

(Staf Pengajar Jur. Sejarah, Fak. Ilmu Budaya, Univ. Andalas Padang)

Kota Padang adalah salah satu kota di Sumatra Barat yang sangat jelas proses pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan awalnya berhubungan langsung dengan kehadiran orang Eropa umumnya dan pemerintah Hindia Belanda khususnya di negeri ini. Orang Eropa, terutama pejabat sipil dan militer, serta para pengelannya banyak menuliskan kesan atau apa yang mereka ketahui, lihat dan dengar tentang kota Padang. Hal yang sama, bahkan lebih banyak dan detil informasinya, juga dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda (dan VOC). Kedua pemerintahan tersebut membuat catatan yang lengkap mengenai kota Padang. Penyebab lainnya adalah signifikannya peran sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dimainkan kota Padang. Kesemua peran yang dilakoninya tersebut telah membuat kota Padang senantiasa dicatat atau menjadi bagian dari dunia tulis menulis.

Walaupun belum ada bibliografi khusus mengenai kota Padang, diyakini ada ratusan atau ribuan tulisan mengenai kota ini. Dari penelusuran awal, sebagaimana yang terlihat dari catatan historiografis dan bibliografis kota Padang, penulisan dan pencatatan tentang berbagai hal atau kejadian yang terjadi di kota Padang telah dilakukan sejak tahun-tahun pertama kehadiran orang Eropa di kota ini hingga saat sekarang. Bahkan, catatan pada waktu belakangan jumlah sangat banyak. Sehingga bisa dikatakan, kota Padang adalah salah satu kota, setidaknya di Sumatra Barat, yang paling lengkap sejarahnya dan catatan tertulisnya. Semua itu, menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangannya menjadi sangat jelas.

Karena telah banyak buku atau tulisan mengenai sejarah kota Padang, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan citra kota Padang sebagaimana dikemukakan oleh para penulis. Citra yang dimaksud adalah imej, kesan dan

^{*)} Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari “Museum Dalam Perspektif Sejarah dan Pendidikan”, Padang, 21 September 2021.

persepsi yang dikemukakan oleh penulis atau pengamat tentang kota Padang. Di samping itu, saya juga akan menyajikan identitas kota Padang sebagai hasil dari perjalanan sejarahnya yang demikian panjang. Citra dan imej yang akan ditampilkan diambil dari berbagai karya tulis dan kesan yang dimiliki melalui ingatan kolektif mereka.

Ada banyak citra dan imej atau identitas yang ditemukan dalam berbagai buku, artikel atau ingatan kolektif masyarakat selama ini tentang Padang. Beberapa di antaranya adalah Padang sebagai kota pelabuhan, Padang sebagai pusat administratif (pemerintahan), Padang sebagai kota dagang, Padang sebagai kota multietnik, Padang sebagai kota tentara, dan Padang sebagai kota pendidikan.

Sajian berikut menampilkan citra dan identitas tersebut berdasarkan berbagai tulisan dan pengetahuan sejarah masyarakat kota Padang khususnya atau Sumatra Barat pada umumnya.

Padang Sebagai Kota Pelabuhan

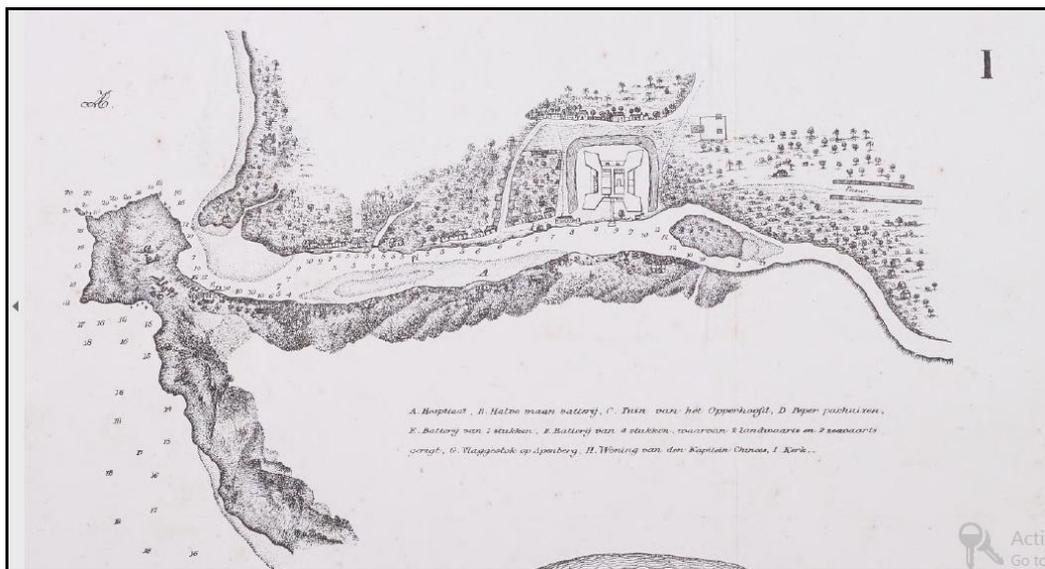
Tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya perkembangan sejarah kota Padang diawali dengan adanya pelabuhan di kota itu. Adanya pelabuhan inilah yang membuat Belanda memilihnya sebagai basis pemerintahan dan kegiatan dagang serta militernya.

Dalam perjalanan sejarah, Padang tidak memiliki satu tetapi dua atau tiga pelabuhan pada waktu yang bersamaan. Kedua atau ketiga pelabuhan tersebut memiliki peran dan pelayanan yang berbeda pula. Kenyataan ini tidak hanya untuk tetapi membuktikan bahwa Padang memang sebagai sebuah kota pelabuhan.

Kota pelabuhan diartikan sebagai sebuah kota yang dibangun dalam kaitannya dengan adanya pelabuhan atau sebuah kota yang pertumbuhan, perkembangan, naik atau turunnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas pelabuhan. Merujuk kepada gambaran yang disajikan di atas, Padang cocok menyandang gelar sebagai kota pelabuhan. Di samping itu perjalanan sejarah kota Padang, berhubungan langsung dengan keberadaan pelabuhannya. Dengan kata lain, kota Padang, terutama sekali pada masa awal keberadaannya hingga tahun-tahun permulaan 1970-an berhubungan erat dengan keberadaan pelabuhannya. Pada awal keberadaannya

hingga akhir abad ke-19, apa yang dinamakan kota Padang itu tidak bisa dipisahkan dengan pelabuhan. Pusat kota berlokasi di dekat pelabuhan.. Loji VOC, sebagai kantor Opperhoofd, pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi, serta pemukiman utama kota berada di sekitar pelabuhan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai tulisan dan lukisan (peta). salah satu diantaranya karya E. Netscher.

Padang Akhir Abad ke-18

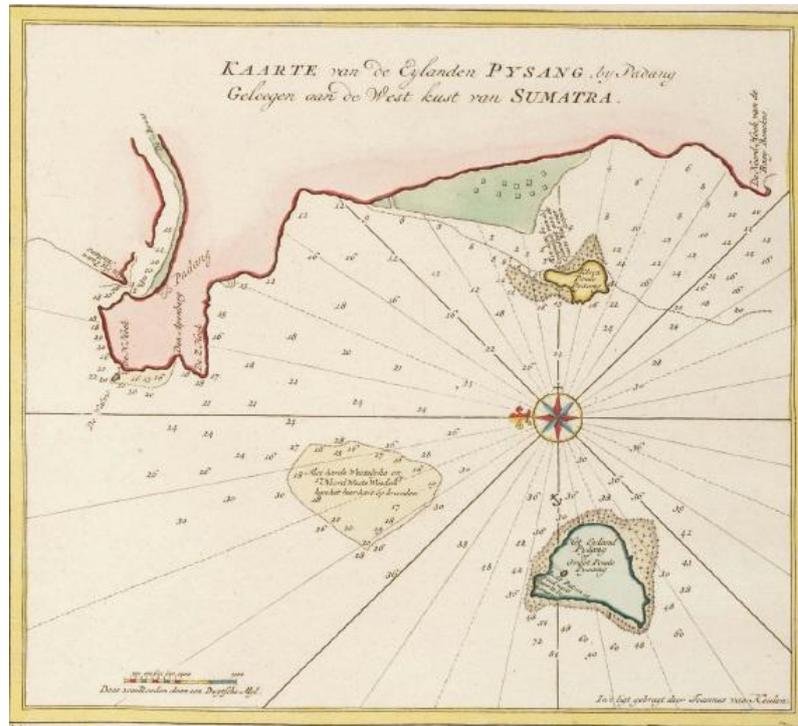


(Sumber: Netscher, E., “Padang in het Laatst der 18e. Eeuw” dalam *Verhandelingen van het Koloniaal Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde*, 41, 1881)

Ketika kegiatan perkapalan dan pelayaran semakin ramai Kota Padang kemudian membuat pelabuhan baru yang diperuntukan bagi kapal-kapal samudra. Sejak Perang Padri umumnya dan sejak Tanam Paksa Kopi khususnya kunjungan kapal samudra dengan bobot yang besar cukup tinggi ke kota Padang. Pelabuhan Muara tidak layak lagi, Untuk itulah dibangun pelabuhan baru. Pelabuhan baru yang dimaksud berlokasi di Pulau Pisang yang juga dinamakan *Reede van Pulau Pisang*.

Reede van Pulau Pisang berlokasi sekitar setengah jam berperahu dari Muara. Barang-barang dan penumpang yang akan naik kapal di *reede* dibawa dari Pelabuhan Muara dengan perahu. Sebaliknya barang dan penumpang yang turun di *reede* akan dibawa dengan perahu ke Pelabuhan Muara. Peta berikut menampilkan *Reede* Pulau Pisang dan Pelabuhan Muara.

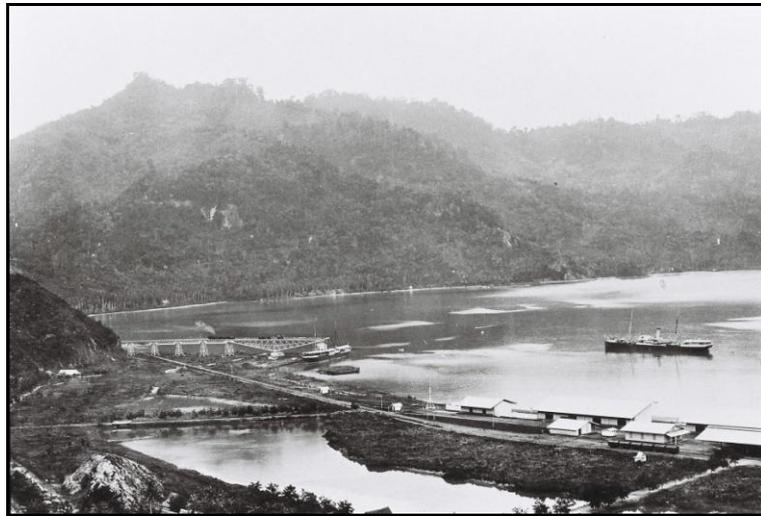
Reede Pulau Pisang dan Pelabuhan Muara



(Sumber: Eko Yulianto, dkk. *Mengawal Semangat Kewirausahaan Peran Saudagar dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017).

Pada akhir abad ke-19, ketika kegiatan pelayaran dan perkapalan serta dunia niaga kota Padang (Sumatra Barat) sedang ramai-ramainya, maka *Reede* Pulau Pisang dan Pelabuhan Muara dirasa tidak cukup lagi menampung kunjungan kapal. Apalagi saat itu direncanakan pula penambangan batubara Sawahlunto dan Padang adalah pelabuhan ekspornya. Perkembangan ini semua membutuhkan pelabuhan baru. Tidak hanya baru, tetapi juga lebih besar dan canggih. Untuk itulah dibuat Emmahaven.

Pelabuhan Emmahaven Pada Awal Abad ke-20



(Sumber; Koleksi Foto Lama Minangkabau Yayasan Rusli Amran)

Pelabuhan Emmahaven tidak hanya menjadi pelabuhan tercanggih di Asia Tenggara, khususnya dalam sistem pengisian batubara, tetapi sangat penting artinya bagi mobilitas Urang Awak. Kebetulan, seiring dengan pembukaan Emmahaven terjadi lonjakan mobilitas orang Minang ke Pulau Jawa. Mereka merantau ke sana untuk melanjutkan pendidikan khususnya dan mengadu untung (berdagang atau berniaga) pada umumnya.

Peran sosial dan budaya Emmahaven kemudian berlanjut hingga masa sesudah proklamasi kemerdekaan, tahun 1960-an hingga 1970-an. “Eksodus” orang Minang pasca-PRRI menambah pentingnya pelabuhan Telukbayur. Telukbayur menjadi pintu gerbang keluar (dan masuk) orang Minang.

Puncak keberadaan pelabuhan sebagai citra, imej dan identitas kota Padang memang terjadi tahun 1960-an dan awal 1970-an. Dalam kaitan dengan itulah kiranya bisa dipahami lahirnya lagu Erni Johan yang berjudul ‘Selamat Tinggal Teluk Bayur’.

Walaupun tidak atau kurang memiliki makna sosial-budaya, julukan Padang sebagai Kota Pelabuhan kemudian bertambah lagi dengan dibukanya Pelabuhan Bungus guna melayani kapal-kapal tujuan Kepulauan Mentawai. Pembukaan Pelabuhan Bungus merupakan sebuah alternatif terhadap ‘terlalu kecilnya Pelabuhan

Muara dan terlalu besarnya Telukbayur' untuk kapal-kapal tujuan Mentawai. Pelabuhan Bungus lebih dominan peran ekonomisnya bagi kota Padang.

Pelabuhan Bungus



Padang Sebagai Pusat Administratif (Pemerintahan)

Kesan dan imej penulis dan kebijakan politik pemerintah juga menempatkan kota Padang sebagai pusat administratif (pemerintahan). Pasca-Traktat Painan, VOC memindahkan pusat pemerintahannya dari Pulau Cingkuak ke Padang. Di Padang kemudian dibangun loji yang sekaligus menjadi pusat pemerintahannya. Seiring dengan semakin kukuhnya kekuasaan VOC di Pantai Barat Sumatra dan seiring pula dengan pembentukan unit administratif *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust*, maka Padang ditetapkan sebagai ibu kotanya. Sejak saat itu lekatnya dan resminya Padang sebagai pusat administrasi (pemerintahan) untuk Pantai Barat Sumatra (Sumatra Barat).

Kedudukan Padang sebagai pusat pemerintahan tetap berlanjut pada masa masa Pemerintahan Sementara (*Tuschenbestuur*) Inggris, dan kekuasaan Hindia Belanda. Berbagai nama unit administratif yang dibentuk pada masa Hindia Belanda, mulai dari *Residentie van Padang*, *Residentie van Padang en Onderhoorigheden*, *Gouvernement van Sumatra Westkust*, *Residentie Sumatra Westkust* tetap menjadikan Padang sebagai ibu kotanya, sebagai puat pemerintahannya.

Bila pada masa VOC Padang menjadi lokasi loji, maka pada masa pemerintahan keresidenan dan gubernemen, Padang menjadi tempat kediaman Residen dan Gubernur.

Rumah Gubernur Sumayra's Westkust di Padang



(Sumber; Koleksi Foto Lama Minangkabau Yayasan Rusli Amran)

Kedudukan Padang sebagai pusat pemerintahan tetap berlanjut pada zaman Jepang. Tentara pendudukan Jepang menjadikan Padang sebagai ibu kota *Sumatora Nishi Kaigan Shu* (Bukittinggi sebagai Pusat Komando Tentara ke-25).

Pada hari-hari pertama setelah kemerdekaan, pemerintah RI juga menjadi Padang sebagai pusat Keresidenan Sumatra Barat. Namun sejak Oktober 1945 Padang dikuasi Sekutu dan kemudian NICA maka oleh Sekutu dan NICA Padang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Sumatra Barat sepertimasa sebelum zaman Jepang. Keadaan ini berlangsung hingga Pengakuan Kedaulatan.

Padang kembali menjadi pusat pemerintahan setingkat provinsi sejak tahun 1957 umumnya dan sejak tahun 1958 khususnya. Bukti Padang sebagai pusat pemerintah Sumatra Barat maka dibangunlah Kantor Gubernur di kota itu. Di samping itu, di Padang juag ditempatkan semua kantor pejabat setingkat provinsi. Sejak tahun 1960-an sanga terasa nuansa kota adminisitratif dikota Padang. Pembangunan kantor pemerinthan, bahkan perumahan untuk para pegawai pemerintahan mendominasi kota Padang tahun 1960-an hingga 1970-an.

Kantor Gubernur Sumatra Barat Pada Awal 1970-an

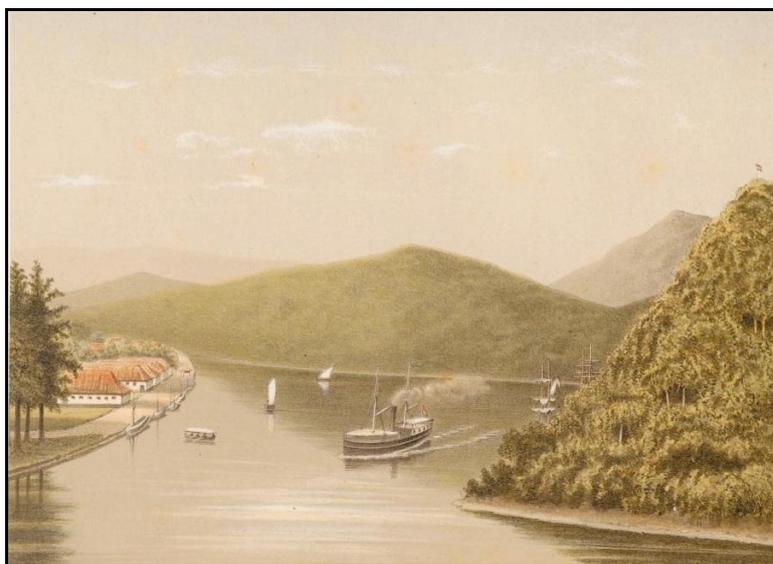


Padang Sebagai Kota Dagang

Sejak awal, VOC telah merancang Padang sebagai kota dagang. Penempatan loji, yang juga berfungsi sebagai gudang di kota Padang membuktikan pernyataan bahwa Padang juga berperan sebagai *handelsstad*. VOC memang memusatkan aktivitas niaganya di kota Padang. Barang-barang yang didatangkan dari luar (Batavia) atau dari India misalnya ditempatkan di kota Padang terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke daerah-daerah lain yang menjadi bagian dari *Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust*. Sebaliknya pengiriman barang-barang keluar, Batavia atau India dilakukan dari Padang.

Untuk menampung barang-barang impor dan ekspor maka, di samping loji, di Padang juga dibangun gudang-gudang yang besar dan kokoh untuk masanya. Karena ramai dan banyak volume perdagangan, sebagai mana disebut Eschel-Kroon, di kota itu dibangun sejumlah gudang. Banyak dan jenis gudang VOC di Padang pada akhir abad ke-18 adalah: 3 gudang besar untuk kain, 2 gudang besar tu garam, 2 gudang untuk lada, 1 gudang untuk besi, baja, dan tembaga, dll. dan 4 gudang untuk menyimpan berbagai komoditas dagang selain dari yang disebut di atas.

Pelabuhan Muara dengan Gudang-Gudangnya



(Sumber: Perelaer, M.T.H., *Buitembezittingen*. Leiden: A.W. Sijthoff, 1883).

Ada puluhan jenis komoditas dagang yang diimpor dan diekspor dari kota Padang pada masa VOC. Seperti disebut di atas, Batavia dan India adalah dua daerah asal barang-barang impor dan tujuan ekspor Pantai Barat. Di samping itu tentu saja Negeri Belanda (Eropa) dan juga Amerika Serikat.

Saudagar Amerika Serikat aktif berdagang di kawasan ini sejak paruh kedua abad ke-18. Berbeda dengan pedagang India atau Jawa serta VOC, pedagang Amerika menjadi pembeli utama kopi Sumatra Barat saat itu.

Kopi memang menjadi komoditas dagang utama Sumatra Barat sejak akhir abad ke-18. Kopi tetap menjadi primadona perdagangan Sumatra Barat hingga dekade-dekade terakhir abad ke-19. Perdagangan kopi mencapai puncaknya tahun 1850-an hingga 1870-an, saat diperkenalkannya Tanam Paksa Kopi. Pada saat itu Padang betul-betul tumbuh menjadi kota dagang terbesar di Pantai Barat Sumatra khususnya dan di Sumatra pada umumnya. Saat itu di Padang ada *Agentschap NHM*, belasan rumah dagang (*handelhuizen*), sejumlah bank (termasuk *De Javasce Bank*), dan sejumlah Konsul dagang negara-negara maju dunia. Kadin Padang juga termasuk Kadin yang paling aktif di Hindia Belanda saat itu. Semua itu menjadikan Padang betul-betul menjadi kota dagang terkemuka di Sumatra.

Gedung De Javasche Bank Padang



Eko Yulianto, dkk. *Mengawal Semangat Kewirausahaan Peran Saudagar dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017.

Padang Sebagai Kota Multietnik

Potret Padang sebagai kota multietnik telah terlihat semenjak pertama kali kota ini dibentuk. Di samping orang Minang, sejak hari-hari pertama keberadaannya, kota Padang didiami pula oleh orang Nias, Tionghoa, dan Belanda. Sejak dikuasai Inggris, di kota ini juga banyak bermukim orang Inggris. Karena Inggris menjadikan orang-orang India dan Bugis sebagai tentaranya, maka di kawasan ini juga banyak bermukim orang India dan Bugis.

Keberagaman penduduk kota Padang semakin meningkat seiring dengan berkuasanya pemerintah Hindia Belanda sejak 1819, serta tumbuhnya Padang menjadi kota dagang yang terbesar dan tersibuk di Sumatra sejak pertengahan abad ke-19. Keberagaman itu semakin meningkat sejak awal abad ke-20 hingga beberapa waktu belakangan.

Data-data kependudukan kota Padang membuktikan keberagaman penduduknya itu. Sejumlah laporan yang dibuat pada masa VOC menyebut bahwa ada orang Belanda, Inggris, India, Bugis, China, Nias dan Melayu (Minang) di Kota Padang. Komposisi yang sama juga ditemukan pada tahun-tahun pertama era Hindia Belanda. Pada masa berikutnya ada penambahan orang Jawa dan Madura, serta penambahan orang Jerman, dan yang relatif banyak adalah orang Indo. Pada awal abad ke-20 juga hadir orang Jepang.

Padang Sebagai Kota Tentara

Imej sebagai kota tentara nampaknya sangat lengket dengan kota Padang. Hal ini, di samping berhubungn dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan, yang juga sekaligus sebagai pusat kedudukan komandan tertinggi tentara, juga disebabkan oleh pernah adanya berbagai kegaduhan sosial-politik di Sumatra Barat, atau di daerah lain di Sumatra yang mesti dihadapi oleh pemerintah dengan pengerahan tentara. Dari catatan sejarah diketahui, bahwa sejak pertama ditubuhkan menjadi kota, jumlah tentara di kota Padang adalah yang terbanyak di bagian barat Sumatra. Sebagaimana dilaporkan Eschel-Kroon misalnya, pada perempat ketiga abad ke-18 Padang dilindungi oleh 28 pucuk meriam. Kepala pemerintahannya (*Opperkooman*) juga sekaligus komandan tentara. Kekuatan militer yang ditempatkan di Padang adalah sebanyak 150 orang dari total 477 orang militer di seluruh Pantai Barat. Di samping itu, di Padang juga ditempatkan 4 kapal perang ukuran 180 sd. 200 ton yang dipersenjatai dengan meriam ukuran 15 dan 16 pon serta sebuah kapal perang kecil bernama Indrapura dengan bobot 60 ton.

Pada hari-hari pertama Padang kembali dikuasai Belanda 1819, jumlah tentara yang ada di kota itu adalah sebanyak 130 orang. Jumlah meningkat tajam pada akhir tahun 1821 menjadi 397 orang. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan tentara dari Batavia yang ditujukan untuk mengempur kaum Padri. Memang tentara tersebut tidak khusus ditempatkan di Padang. Tetapi kehadiran mereka telah merubah wajah kota menjadi kota tentara. Jumlah tentara yang didatangkan terus meningkat hingga mencapai 2.000 orang lebih (termasuk tentara bantuan dari berbagai suku bangsa di Indonesia).

Pada saat Perang Padri berlangsung pertahanan kota Padang juga diperkuat dengan penambahan atau perbaikan sistem pertahanan kota, dan penambahan pasukan pengawal kota yang terdiri dari warga kota dari suku Nias dan Tionghoa.

Citra kota Padang sebagai kota tentara terjadi lagi pada awal abad ke-20. Hal ini berkaitan dengan pecahnya Perang Aceh, dan Padang menjadi kota transit kapal dan tentara yang akan dikirim ke Aceh atau tentara yang baru pulang dari Aceh. Saat itu ada banyak tangsi dan gedung serta rumah sakit tentara di bangun di kota Padang.

Sekali lagi, citra kota tentara tercipta pada tahun 1958 dan tahun-tahun sesudahnya. Saat itu, dalam rangka memadamkan PRRI, Jakarta mengirim ribuan tentara ke Sumatra Barat dan pusat komandonya berada di kota Padang. Padang bahkan dijadikan sebagai markas Komando Daerah Militer yang sengaja dibuat untuk mengakhiri keberadaan PRRI. Sejak tahun 1958 kehadiran tentara sangat dominan di kota Padang. Bangunan atau gedung milik tentara dengan warna khas hijau tersebar di mana-mana.

Padang Sebagai Kota Pendidikan

Padang sebagai kota pendidikan mengandung makna terkonsentrasinya lembaga pendidikan dalam jumlah yang banyak serta dengan kualifikasi yang tinggi di kota Padang. Tidak diragukan lagi, kota Padang tercatat sebagai kota pertama di Sumatra Barat yang memiliki lembaga pendidikan Barat. Lembaga pendidikan tersebut telah ada di kota Padang sejak tahun 1828. Memasuki perempat keempat abad ke-19 sejumlah lembaga pendidikan lain bermunculan di kota Padang, mulai dari ELS, Schakel School, Meisjes School, hingga MULO.

Tidak hanya pendidikan Barat, pendidikan Islam (modern) juga beridiri di kota ini. Sekolah Adabiah dan kemudian PGAI adalah dua di antara sekian banyak contohnya. Di samping lembaga pendidikan yang Islam dan diorganisir oleh persyarikatan sosial-pendidikan Islam, di Padang juga dibuka lembaga pendidikan yang dijalankan oleh misi Kristen.

Sekolah Adabiah 1915



(Sumber: Gusti Asnan dkk. Gusti Asnan, Nopriyasman, Syafrizal, *Adabiah: Perintis Pendidikan Moderen di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)

Frateran Padang



(Sumber: *1912-1937: Vijf en Twintig Jaar Padang Missie 13 Juni '37*. Padang: Vicariate Apostolic, 1937).

Cira sebagai kota pendidikan tetap berlanjut pada era kemerdekaan, khususnya setelah pengakuan kedaulatan. Berdirinya Sekolah Tinggi Hukum Pantjasila mengawali tampilnya Padang sebagai ‘Kota Sekolah Tinggi’. Citra sebagai ‘Kota Sekolah Tinggi’ semakin identik dengan Padang pasca-PRRI. Sebagai bagian dari reorganisasi pemerintahan Sumatra Barat, Jakarta memusatkan kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Sumatra Barat di kota Padang. Sejak awal 1960-an, sekolah-sekolah tinggi yang menjadi bagian dari Universitas Andalas yang sebelumnya berserak-serak di sejumlah kota di Sumatra Barat dipusatkan di Padang.

Tidak hanya pendidikan tinggi ‘sekuler’, Padang juga menjadi pusat Pendidikan Tinggi islami, dan itu ditandai dengan pembukaan IAIN Imam Bonjol.

Di samping itu juga ada sejumlah pendidikan tinggi swasta di kota Padang.

Hingga awal tahun 2.000-an, Padang adalah kota dengan jumlah lembaga pendidikan tinggi terbanyak di Sumatra Tengah.

Akhirul Kalam

Kota adalah hunian yang sangat dinamis. Kota adalah sebuah ruang yang ‘hidup’ Kota bisa tumbuh, berkembang, dan jaya. Sebaliknya, kota juga bisa mengalami kemunduran dan bisa menjadi mati. Imej dan citra kota juga bisa beragam dan berubah. Perubahan imej dan citra kota tersebut sangat tergantung pada jiwa zaman dan suasana kekinian kota saat imej dan citranya terbentuk. Namun, sebagaimana sejarah, sekali imej dan citra terbentuk, maka dia akan tersimpan dalam catatan sejarah dan memori warga kota khususnya.

Seperti telah dikemukakan di atas, ada beragam imej dan citra kota Padang. Sebagian imej dan citra tersebut masih tetap ada dan cocok untuk kota Padang saat sekarang, tetap sebagian lainnya telah ‘tinggal’ dalam kenangan. Sama dengan sejarah, imej dan citra bisa dijadikan modal untuk memahami keadaan masa kini dan juga sebagai bekal untuk merancang masa depan. Berbagai imej dan citra yang pernah dimiliki kota Padang di masa lampau kiranya bisa dijadikan bagai pedoman untuk merancang berbagai kebijakan kota Padang pada saat ini serta membuat sejumlah rencana untuk pembangunan, serta pengembangan kota Padang di masa datang.

Daftar Kepustakaan

Colombijn, Freek, *Paco-Paco (Kota) Padang Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2006.

Ecshels-Kroon, Adolf, *Beschrijving van het Eiland Sumatra*. Haarlem: C.H. Bohn en Zoon, 1883.

Eko Yulianto, dkk. *Mengawal Semangat Kewirausahaan Peran Saudagar dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017.

- Gusti Asnan, *Trading and Shipping Activities: The West Coast of Sumatra 1819-1906*. Jakarta: Yayasan Rusli Amran, 2000.
- Hasril Chaniago, Khairul Jasmi. *Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Joustra, M., *Minangkabau: Overzicht van het Land, Geschiedenis en Volk*. Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer, 1923.
- Kielstra, E.B., "Sumatra's Westkust Onder Compagnie Beheer" dalam *Onze Eeuw*, 19, IV, 1919.
- , "Sumatra's Westkust Sedert 1850" dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No. 41 tahun 1892, hal. 254-330; 622-706.
- , "Sumatra's Westkust van 1836-1840" dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No. 39 tahun 1890, hal. 127-21; 263-348.
- , "Sumatra's Westkust van 1833-1835" dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No. 38 tahun 1889, hal. 467-514.
- , "Sumatra's Westkust van 1826-1832" dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No. 37, tahun 1888, hal. 216-380.
- , "Sumatra's Westkust van 1819-1825" dalam *Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, No. 36 tahun 1887, hal. 7-163.
- Kroeskam, Hendrik, *De Westkust en Minangkabau (1665-1668)*. Utrecht, Fa. Schotanus & Jens, 1931.
- Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah: 1945-1995*. Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Nahuijs, Kolonel, *Brieven over Bencoolen, Padang, enz. het Rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo-Pinang* (2de vermeerde Druk). Breda: F.B. Holingerus Pijpers, 1827.
- Netschers, E. "Padang in het Laatste der 18e. Eeuw" dalam *Verhandelingen van het Koloniaal Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde*, 41, 1881
- Propinsi Sumatera Tengah*. Djakarta: Dep. Penerangan, 1953.
- Stuers, H.J.J.L. de, *Vestiging en Uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra* (Vol. I & II). Amsterdam: P. Baeumer & Co., 1849, 1850.